

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDRB Harga Konstan tahun 2010 dan jumlah penduduk dari Kawasan Banua Anam Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2012-2016.

Kawasan Banua Anam sebelumnya adalah meliputi wilayah pengembangan Banua Lima karena Kabupaten Balangan merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Hulu Sungai Utara yang kemudian membentuk kabupaten baru sehingga Banua Anam terdiri dari Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Kabupaten Tabalong. Pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan membentuk kawasan andalan yang dapat dijadikan kawasan prioritas sebagai pengembangan pemerataan pembangunan sesuai dengan Perda Nomor 9 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Kalimantan Selatan yang diharapkan dapat mendorong potensi serta mengurangi ketimpangan regional antardaerah guna mewujudkan pemerataan yang berkesinambungan.

Wilayah Pengembangan “Banua Anam” dengan pusat pengembangannya adalah Kota Kandangan yang dikarenakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ingin adanya aksesibilitas daerah pedalaman dengan meningkatkan aksesibilitas antar wilayah pengembangan kawasan Banua Anam dan kawasan Tanah Bumbu sehingga Kota Kandangan dijadikan sebagai simpul transportasi

antar sub regional dengan Batulicin sehingga adanya peningkatan Jalan Kandangan-Batulicin dan Jalan Sengayam-Batulicin. Hal ini dapat menciptakan peningkatan terhadap aksesibilitas wilayah-wilayah pedalaman/kawasan transmigrasi sepanjang jalan tersebut.

Di bawah ini merupakan statistik deskriptif data yang digunakan dalam penelitian:

Tabel 4.1
Statistik Deskriptif Data Penelitian

Thn	Data	Tapin	HSS	HST	HSU	Balangan	Tabalong
2012	PDRB ADHK	4.605.780	3.155.163,06	3.329.328	2.288.014,89	7.147.781,65	11.625.110,10
	Jlh Pddk	173.869	218.897	250.705	215.980	117.088	227.714
2013	PDRB ADHK	4.870.635	3.334.465,09	3.523.288	2.410.137,58	7.722.399,92	12.132.178,20
	Jlh Pddk	176.468	221.614	253.868	219.210	119.171	231.718
2014	PDRB ADHK	5.135.704	3.527.586,59	3.719.105	2.554.597,22	8.177.672,38	12.621.202,19
	Jlh Pddk	179.166	224.474	257.107	222.314	121.318	235.777
2015	PDRB ADHK	5.343.467	3.741.146,62	3.947.040	2.691.025,46	8.383.573,89	12.919.067,71
	Jlh Pddk	181.778	227.153	260.292	225.386	123.449	239.593
2016	PDRB ADHK	5.602.698	3.968.727,46	4.192.094	2.817.624,50	8.383.573,89	13.313.987,96
	Jlh Pddk	184.330	229.889	263.376	228.528	125.534	243.477

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, data diolah, Fathimatudzahra 2018

Ket: Thn = Tahun, PDRB ADHK (dalam jutaan rupiah) = Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan, Jlh Pddk (dalam jiwa) = Jumlah Penduduk, HSS = Hulu Sungai Selatan, HST = Hulu Sungai Tengah, HSU = Hulu Sungai Utara.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa PDRB dan jumlah penduduk di Kawasan Banua Anam dari tahun 2012-2016 terus mengalami peningkatan. Kondisi demografi yang baik lebih cenderung meningkatkan produktivitas kerja. Kondisi ini meliputi perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan,

perbedaan tingkat kesehatan dan pendidikan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan dan perbedaan tingkah laku seperti kebiasaan dan etos kerja yang dimiliki masyarakat daerah bersangkutan. sehingga dapat meningkatkan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi di Kawasan Banua Anam.

B. Analisis Ketimpangan Pendapatan Kawasan Banua Anam Provinsi Kalimantan Selatan

Adanya ketimpangan antar wilayah menjadi salah satu tanda adanya daerah atau wilayah-wilayah yang tertinggal. Ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota pada Kawasan Banua Anam Provinsi Kalimantan Selatan dihitung menggunakan data PDRB Banua Anam. Jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahun juga memengaruhi PDRB per kapita yang diperoleh dari pembagian antara PDRB Kawasan Banua Anam dengan jumlah penduduk.

Kawasan Banua Anam salah satu daerah yang aktivitas perekonomiannya cenderung berkembang cepat. Perbedaan kondisi geografis, sasaran program, kebijakan, serta kondisi sarana dan prasarana mengakibatkan terjadinya perbedaan pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Hal tersebut selanjutnya akan dapat memicu terjadinya ketimpangan antar wilayah. Untuk mengetahui seberapa besar ketimpangan pendapatan yang terjadi di Kawasan Banua Anam Provinsi Kalimantan Selatan, maka analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah indeks Williamson dan indeks Entropi Theil. Indeks Williamson mempunyai keunggulan ukuran nilai ketimpangan wilayah yang jelas terutama antar subwilayah, sedangkan indeks Entropi Theil mampu menjelaskan penyebab ketimpangan wilayah yang terjadi.

1. Analisis Indeks Williamson

Indeks Williamson merupakan salah satu indeks yang paling sering digunakan dalam mengukur ketimpangan antar wilayah. Indeks Williamson digunakan untuk mendeskripsikan ketimpangan wilayah dengan menggunakan nilai PDRB per kapita dapat digunakan untuk mendeskripsikan ketimpangan pendapatan antar wilayah. Indeks Williamson akan dapat menghasilkan indeks yang lebih besar atau sama dengan nol. Jika menghasilkan nilai indeks nol berarti ketimpangan tidak terjadi antar wilayah tersebut, sedangkan indeks lebih besar dari nol menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan antar wilayah. Semakin besar indeks yang dihasilkan maka semakin besar tingkat ketimpangan antar wilayah.

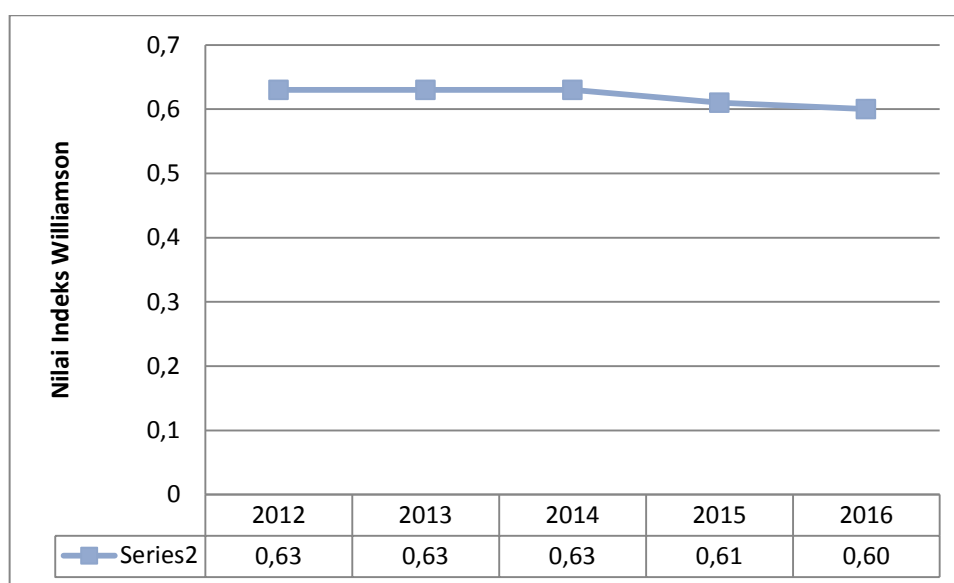
Analisis indeks Williamson ini menggunakan data PDRB Harga Konstan per kapita dan jumlah penduduk pada Kawasan Banua Anam Provinsi Kalimantan Selatan dalam kurun waktu lima tahun yaitu dari tahun 2012 sampai tahun 2016, dengan tingkat ketimpangan dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Indeks Williamson Kawasan Banua Anam Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2012-2016

No	Tahun	Indeks Williamson	Perubahan
1	2012	0,63	-
2	2013	0,63	0
3	2013	0,63	0
4	2015	0,61	-0,02
5	2016	0,60	-0,01
Rata-Rata		0,62	

Sumber : Hasil Analisis Indeks Williamson, data diolah, Fathimatudzahra 2018

Berdasarkan hasil analisis tersebut, terdapat ketimpangan dari nilai indeks Williamson Kawasan Banua Anam Provinsi Kalimantan Selatan terlihat dari lima tahun perjalanan tahun 2012-2016 yang memiliki nilai indeks lebih dari nol dengan nilai rata-rata indeks Williamson sebesar 0,62. Nilai indeks Williamson menunjukkan adanya perbedaan ketimpangan pendapatan yang berbeda dan bahkan sama selama tahun 2012-2016.



Gambar 4.1. Nilai Indeks Williamson Kawasan Banua Anam Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012-2016

Berdasarkan hasil analisis grafik pada Gambar 4.1 dan Tabel 4.2 menunjukkan pada tahun 2012 nilai indeks Williamson sebesar 0,63. Namun setelah tahun 2012 tidak terjadi peningkatan maupun penurunan di tahun 2013 dan tahun 2014 yang tetap stabil berada pada 0,63 selama tiga tahun berturut-turut. Pada tahun 2015 terjadi penurunan sebesar 0,02 menjadi 0,61 dan terus mengalami penurunan sebesar 0,01 di tahun 2016 menjadi 0,60. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan pada Kawasan Banua Anam Provinsi Kalimantan Selatan mengalami

penurunan, meskipun masih termasuk dalam karakteristik ketimpangan dengan taraf tinggi.

Nilai indeks Williamson yang kecil menggambarkan tingkat ketimpangan rendah atau pemerataan yang baik, dan sebaliknya jika nilai indeks Williamson besar maka tingkat ketimpangan akan semakin tinggi. Indeks Williamson Kawasan Banua Anam Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan nilai lebih dari 0,5 ($IW > 0,5$) yang berarti ketimpangan pendapatan di daerah tersebut berada di level tinggi. Nilai indeks tertinggi terjadi pada tahun 2012 hingga 2014 sebesar 0,63. Namun nilai indeks Williamson selama lima tahun telah menunjukkan penurunan. Hal ini menandakan bahwa adanya pemerataan antar wilayah di Kawasan Banua Anam Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan nilai indeks Williamson yang terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 0,60. Meskipun masih berada dalam taraf ketimpangan level tinggi, tetapi Kawasan Banua Anam Provinsi Kalimantan Selatan telah berhasil mengurangi ketimpangan yang terjadi di daerahnya.

2. Analisis Indeks Entropi Theil

Dalam penelitian ini juga digunakan Indeks Entropi Theil untuk lebih jauh mengkaji besarnya ketimpangan yang terjadi di Kawasan Banua Anam Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2012-2016. Indeks Entropi Theil yang semakin besar berarti menunjukkan ketimpangan yang semakin besar, bila nilai indeksnya kecil maka distribusi pendapatan lebih merata, hal tersebut sejalan dengan Indeks Williamson. Indeks Entropi Theil pada dasarnya

merupakan aplikasi konsep teori informasi dalam pengukuran ketimpangan ekonomi dan konsentrasi industri.

Analisis indeks Entropi Theil menggunakan data PDRB Harga Konstan per kapita dan jumlah penduduk pada Kawasan Banua Anam Provinsi Kalimantan Selatan dalam kurun waktu lima tahun yaitu dari tahun 2012-2016, dengan nilai ketimpangan dapat dilihat pada Tabel 4.3.

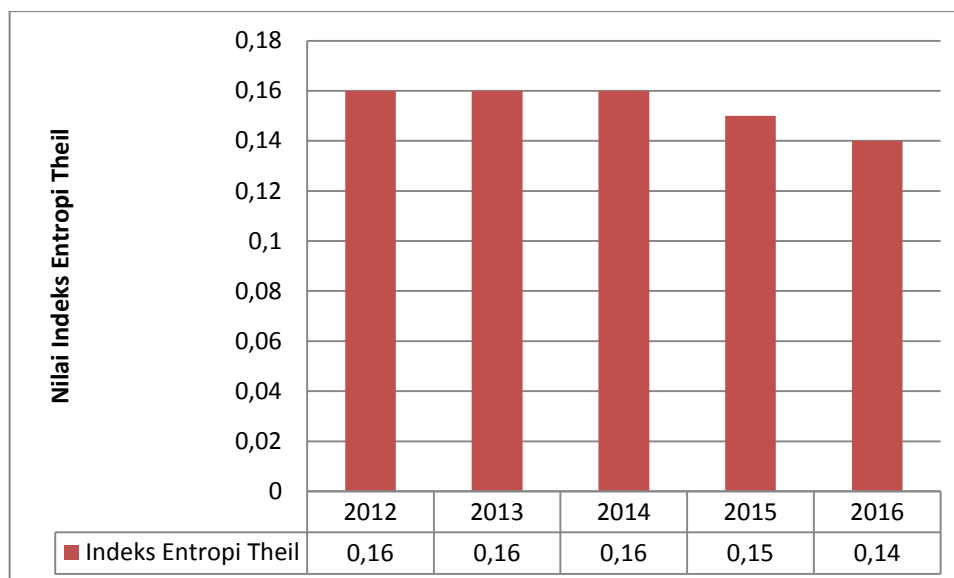
Tabel 4.3
Indeks Entropi Theil Kawasan Banua Anam Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2012-2016

No	Tahun	Indeks Entropi Theil
1	2012	0,16
2	2013	0,16
3	2013	0,16
4	2015	0,15
5	2016	0,14
Rata-Rata		0,154

Sumber : Hasil Analisis Indeks Entropi Theil, data diolah, Fathimatudzahra 2018

Berdasarkan Tabel 4.3, pada tahun analisis diperoleh nilai rata-rata indeks Enrotpi Theil di Kawasan Banua Anam Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 0,154. Selama periode 2012-2016 adanya kecenderungan penurunan nilai indeks yang dimulai tahun 2015. Ketimpangan yang menurun disebabkan oleh adanya konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, alokasi investasi yang merata, serta tingkat mobilitas faktor produksiantar daerah.

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 4.2.



Gambar 4.2. Nilai Indeks Entropi Theil Kawasan Banua Anam Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012-2016

Hasil perhitungan indeks Entropi Theil menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan pada Kawasan Banua Anam Provinsi Kalimantan Selatan dengan tingkat ketimpangan sebesar 0,16 untuk tahun 2012. Pada tahun 2013 dan 2014 tidak terjadi peningkatan ataupun penurunan nilai indeks Entropi Theil yang masih tetap berada di angka 0,16. Tahun 2015 terjadi penurunan yang kemudian nilai indeksnya menjadi 0,15. Nilai indeks Entropi Theil terus mengalami penurunan pada tahun 2016 yang mana besar nilai indeksnya adalah 0,14.

Nilai indeks Entropi Theil tersebut menunjukkan bahwa di Kawasan Banua Anam Provinsi Kalimantan Selatan disrtibusi pendapatannya relatif tidak merata, dengan kata lain mengalami ketimpangan pendapatan yang kerana nilai indeks tersebut menunjukkan lebih dari nol.

Tabel 4.4
Indeks Entropi Theil 6 Kabupaten di Kawasan Banua Anam Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012-2016

Kawasan Banua Anam	Indeks Entropi Theil					Rata-Rata
	2012	2013	2014	2015	2016	
Tapin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hulu Sungai Selatan	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
Hulu Sungai Tengah	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
Hulu Sungai Utara	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
Balangan	0,19	0,20	0,20	0,19	0,18	0,19
Tabalong	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,05
Nilai Indeks Entropi Theil	0,16	0,16	0,16	0,15	0,14	0,154

Sumber : Data diolah, Fathimatudzahra 2018

Berdasarkan hasil perhitungan dari tahun 2012-2016 pada enam kabupaten di Kawasan Banua Anam Provinsi Kalimantan Selatan dapat diketahui bahwa nilai rata-rata indeks Entropi Theil lebih dari nol. Tabel 4.4 menunjukkan bahwa Kabupaten Balangan mempunyai kontribusi terbesar terhadap terjadinya ketimpangan di wilayah Kawasan Banua Anam Provinsi Kalimantan Selatan dengan rata-rata nilai indeks Entropi Theil sebesar 0,19. Yang mana rinciannya sebagai berikut, tahun 2012 nilai indeks Entropi Theil sebesar 0,19 , 0, 20 ditahun 2013 dan bertahan sampai tahun 2014, kemudian mengalami penurunan di tahun 2015 dengan nilai indeks 0,19 dan di tahun 2016 dengan nilai indeks sebesar 0,18. Walaupun mengalami penurunan tetapi Kabupaten Balangan selama lima tahun dari tahun 2012-2016 masih tergolong bahwa distribusi PDRB ADHK tidak merata.

Kabupaten Tapin, dalam penelitian ini bisa dikatakan stabil bahkan tidak terjadi ketimpangan pendapatan selama periode tahun 2012-2016 yang mana nilai rata-rata indeks Entropi Theil sebesar $0,00 = 0$. Dimana nol menyatakan bahwa distribusi PDRB ADHK merata sempurna antar kelompok wilayah.

Indeks Entropi Theil pada tiga kabupaten dilihat dari Tabel 4.4 menunjukkan bahwa belum terjadi perkembangan atau belum optimal selama periode lima tahun dari tahun 2012-2016 dengan nilai rata-rata indeks sebesar $-0,003$, yaitu Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Untuk Kabupaten Tabalong nilai rata-rata indeks Entropi Theil sebesar $0,05$, dengan rincian pada tahun 2012 hingga 2014 nilai indeks Entropi Theil stabil yaitu $0,05$, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2015 dan bertahan hingga tahun 2016 dengan nilai indeks sebesar $0,04$.

Berdasarkan hasil analisis indeks Entropi Theil pada Kawasan Banua Anam Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2012-2016 terlihat bahwa nilai indeks bervariasi dengan kisaran $0,14-0,16$. Perbedaan tingkat ketimpangan pendapatan yang ditunjukkan masing-masing kabupaten pada Kawasan Banua Anam Provinsi Kalimantan Selatan (Tabel 4.4) ini menunjukkan gambaran tentang kondisi dan perkembangan pembangunan yang terjadi dimasing-masing kabupaten. Menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, beberapa faktor yang berpengaruh terhadap perbedaan nilai indeks Entropi Theil yakni perbedaan sumber daya alam

antar wilayah, kondisi kependudukan, perbedaan kondisi geografis antar wilayah serta mobilitas perdagangan antar kabupaten/kota ke provinsi.⁶⁸

Ketimpangan ini terjadi karena adanya konsentrasi kegiatan ekonomi sektor basis di daerah/wilayah tertentu, sehingga yang menikmati hasil hanya sebagian, serta adanya perbedaan sumber daya alam yang dimiliki antar wilayah di Kawasan Banua Anam sehingga berpengaruh terhadap kondisi lingkungan dan infrastruktur, seperti kesehatan dan pendidikan yang harus ditingkatkan oleh pemerintah setempat untuk menunjang sumber daya manusia terus berkembang dan mampu mengelola sumber daya alam ataupun industri dengan baik agar memiliki nilai tambah tinggi demi kemajuan daerah itu sendiri. Pembangunan infrastruktur harus merata disetiap wilayah di Kawasan Banua Anam agar ketimpangan yang terjadi akan berkurang atau tidak ada lagi.

Persoalan ketimpangan pendapatan menyebabkan ketimpangan kekuasaan dalam hal siapa yang membuat aturan, yang menguasai modal dan sumber daya. Ketidakseimbangan kekuasaan yang berakibat pada ketimpangan yang semakin lebar antar wilayah.

Pada dasarnya persoalan ketimpangan pendapatan dalam pandangan ekonomi Islam disebabkan karena buruknya distribusi pendapatan di masyarakat. Dalam politik ekonomi Islam, pemenuhan kebutuhan pokok dijamin oleh pemerintah.

⁶⁸ Badan Pusat Statistik, *Provinsi Kalimantan Selatan dalam Angka tahun 2016*, 2016

Pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam tidak hanya terkait dengan peningkatan volume barang dan jasa, tetapi juga terkait dengan aspek moralitas dan akhlak serta keseimbangan antara tujuan duniawi dan ukhrawi. Ukuran keberhasilan pertumbuhan ekonomi tidak hanya dilihat dari sisi pencapaian materi semata, namun juga ditinjau dari sisi perbaikan kehidupan agama, sosial, dan kemasyarakatan. Jika pertumbuhan ekonomi yang terjadi memicu hilangnya nilai keadilan dan kemanusiaan, maka pertumbuhan tersebut tidak sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Secara umum tujuan pertumbuhan ekonomi dalam Islam adalah terpenuhinya dan terpeliharanya *maqasid syariah* (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), sehingga tercapainya *falah* atau kesejahteraan dunia dan akhirat.⁶⁹

Dalam Islam masalah ketimpangan pendapatan, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, berakses pada persoalan keadilan distribusi. Keadilan menurut dimensi ekonomi Islam diartikan sebagai memberikan kepada semua yang berhak akan haknya, baik pemilik hak itu sebagai individu atau kelompok tanpa melebihi ataupun mengurangi. Tanpa melakukan pemihakan yang berlebihan, setidaknya dalam koridor konsep maupun premis, Islam mengajarkan tentang keadilan lebih dahulu jauh sebelum kaum konvensional meletakkan prinsip-prinsip keadilan dalam ekonomi. Islam telah memiliki dasar hukum yang kuat dalam pengaturan keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban,

⁶⁹ Irfan Syaugi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta : PT Rajagrafindo, 2016) hlm. 23

antara individu dan masyarakat, antara jasmani dan rohani, ataupun antara dunia dan akhirat.⁷⁰

Keadilan dalam distribusi diartikan sebagai suatu distribusi pendapatan dan kekayaan secara adil yang sesuai dengan norma-norma *fairness* yang diterima secara *universal*. Keadaan sosial yang baik adalah keadaan yang memprioritaskan kesejajaran yang ditandai dengan tingkat kesejahteraan pendapatan (kekayaan) yang tinggi dalam sistem sosial, memberikan kesempatan yang sama dalam berusaha, serta mewujudkan aturan yang menjamin setiap orang untuk mendapatkan haknya berdasarkan usaha-usaha produktifnya.⁷¹

Dalam sistem ekonomi Islam, pemerintah memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan dalam upaya menjamin distribusi pendapatan dan kekayaan agar berlangsung dengan baik dan benar, tidak terjasi kesenjangan ekonomi dan sosial. Beberapa pakar ekonomi Islam mengemukakan pendapat tentang apa saja yang harus dilakukan pemerintah dalam fungsi distribusi, sebagai berikut:

- 1) Sayyid Qutb, mengatakan bahwa dalam harta masih ada kewajiban selain zakat. Maka jika diperlukan keuangan untuk pembangunan negara dan kemaslahatan bangsa, pemerintah boleh menetapkan kewajiban membayar pajak dan sebagainya.⁷²
- 2) Khursyid Ahmad. Berdasarkan kondisi ketimpangan internasional dan labilnya pasar, maka negara Islam, organisasi dan lembaga Islam lainnya

⁷⁰ Jusmaliani, *Kebijakan Ekonomi dalam Islam*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), hlm. 23

⁷¹ Syed Nawab Haider Naqli, *Islam, Economics and Society*, (United Kingdom: Kegan Paul Internasional Ltd, 1994), hlm. 73

⁷² Saifuddin Mujtaba, *Belanjakan Harta Anda Sesuai Amanat Allah*, (Jakarta: HI. Press, 1997), hlm. 51

turut serta secara aktif untuk mencapai tujuan khusus. Pemerintah daerah perlu diberikan keluasaan untuk mengembangkan daerahnya sendiri dengan meningkatkan peran serta masyarakatnya. Dengan terus melakukan *checks and balance* serta bimbingan dan pengawasan yang kuat.⁷³

- 3) Taqyuddin An-Nabhani. Apabila masyarakat mengalami kesenjangan yang lebar antar individu dalam memenuhi kebutuhan atau di dalam masyarakat tersebut terjadi kesenjangan karena mengabaikan hukum-hukum Islam, serta meremehkan penerapan hukum-hukum tersebut, maka negara harus memecahkannya dengan cara mewujudkan keseimbangan dalam masyarakat, dengan cara memberikan harta yang menjadi miliknya kepada orang-orang yang memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, negara bisa mencukupinya sehingga dengan terjadinya pemenuhan tersebut akan terwujudnya keseimbangan (*equilibrium*) dalam memenuhi kebutuhannya.⁷⁴
- 4) Mawardi. Harus menjauhkan yang kuat untuk eksploitasi yang lemah. Membagikan tunjangan dan kompensasi yang dari kas negara kepada mereka yang berhak atasnya.⁷⁵

Sistem ekonomi Islam menjadi solusi bagi ketimpangan pendapatan yang terjadi di Kawasan Banua Anam Provinsi Kalimantan Selatan. Mengatasi

⁷³ Khurshid Ahmad, *Op.Cit.*, hlm. 20 – 21

⁷⁴ An Nabhani, *Membangun*, hlm. 272 – 27.

⁷⁵ Muhammad Muslehudin, *Wacana Baru, Manajemen dan Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2004), hlm. 62 – 63

ketimpangan pendapatan tidak bisa secara parsial, namun harus lewat perubahan sistem yang menyeluruh dengan mengganti sistem kapitalisme yang menjadi penyebab utama ketimpangan dengan sistem Islam. Islam tidak memandang bahwa ketimpangan pendapatan merupakan urusan individu semata, tetapi melibatkan negara dan sistemnya.

Dengan demikian, pemerataan distribusi merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan keadilan, di mana Islam menghendaki keamanan harta kekayaan tanpa memandang status sosial. Dengan pemerataan distribusi pendapatan diharapkan ketimpangan yang terjadi di daerah atau wilayah tertentu dapat diminimalisasi, khususnya di Kawasan Banua Anam Provinsi Kalimantan Selatan.

Berdasarkan hasil analisis indeks Williamson dan indeks Entropi Theil di Kawasan Banua Anam Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2012-2016 menunjukkan bahwa terjadi ketimpangan pendapatan. Dari hasil analisis indeks Williamson, Banua Anam mengalami ketimpangan pendapatan yang berada pada level tinggi. Sedangkan hasil analisis indeks Entropi Theil memperlihatkan bahwa belum semua kabupaten pada Kawasan Banua Anam Provinsi Kalimantan Selatan mengalami pemerataan distribusi pendapatan di tahun 2012-2016. Namun untuk periode 2012-2016, Kawasan Banua Anam Provinsi Kalimantan Selatan mengalami penurunan nilai indeks ketimpangan pendapatan, walaupun ada beberapa tahun yang memiliki nilai indeks sama atau stabil. Dari penurunan ketimpangan pendapatan tersebut, bisa dikatakan bahwa Kawasan Banua Anam terus melakukan pembenahan dan terus meningkatkan wilayahnya masing-masing.